

Konsep dalam Pengembangan **Produksi dalam Negeri**

Amalia Salsabila

041811133186

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
EKONOMI PEMBANGUNAN 2018



Bagi Indonesia..

..wacana pengurangan konsumsi produk impor memang bukan hal yang mudah. **Tingkat ketergantungan Indonesia terhadap produk luar negeri yang masih cukup tinggi menyebabkan kenaikan nilai impor seringkali melambung tinggi melebihi nilai ekspor.** Kekuatan ekspor Indonesia dapat lebih ditingkatkan dengan adanya **industrialisasi dan hilirisasi**. Ironisnya, masalah modal dan sumber daya manusia (SDM) seringkali menjadi kendala. **Tanpa ada investasi yang cukup dan ditunjang dengan SDM yang melek teknologi, industrialisasi dan hilirisasi akan berjalan lambat.**



Selain permasalahan SDM..

..Indonesia juga masih terkendala dalam hal sertifikasi dan kemajuan teknologi. Faktor-faktor tersebut menjadikan akses pasar Indonesia masih tergolong rendah. Indonesia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk maju sebagai negara dengan nilai ekspor tinggi jika masih menerapkan pola bisnis industri tradisional.

UU No. 7 Tahun 2004

Perdagangan dalam pasal Pasal 22 dan Pasal 73

Pemerintah harus berperan aktif dalam kegiatan pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan Produk Dalam Negeri melalui beberapa langkah strategis.

Langkah strategis tersebut seperti:

1 Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)


Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan untuk pengembangan dan pendampingan terhadap UMKM, khususnya dari sisi manajemen SDM sehingga dapat naik kelas. **Langkah ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kapasitas daya saing dalam menghadapi persaingan usaha di dalam maupun di luar negeri.** Peningkatan kapasitas SDM dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan **BIMTEK** untuk **meningkatkan pengetahuan kewirausahaan, memberikan pengetahuan tentang akses pembiayaan, memberikan pengetahuan tentang akses pemasaran, dan memberikan pengetahuan tentang akses teentang manajemen keuangan.**



2

Sertifikasi

Dalam aktivitas ekspor yang mengandalkan komoditas unggulan Indonesia, sertifikasi berperan penting. Sertifikasi yang diberikan pada sebuah perusahaan, merupakan **bukti dijalankannya suatu sistem, yang mendorong kepastian mutu, kepatuhan terhadap pelestarian lingkungan, kesinambungan sumberdaya alam hingga mencegah tindakan penyuapan, dari hulu hingga hilir proses produksi.**



Standar Wajib

Standar wajib atau standar primer merupakan standar dan persyaratan yang diwajibkan oleh pemerintah melalui regulasi. Inilah standar utama yang harus dipersiapkan oleh pelaku UKM untuk melakukan ekspor. Biasanya, standar wajib ini berupa **spesifikasi teknis yang dikenakan pada produk yang didistribusikan ke pasar.**

Contoh dari spesifikasi teknis ini adalah berbagai batasan yang boleh terkandung dalam produk. Seringkali, standar wajib ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan, mencegah penipuan, serta menghindari ketidaksesuaian produk. Standar wajib ini harus dipatuhi oleh semua supplier atau eksportir, bagaimanapun situasinya untuk dapat masuk ke suatu pasar atau negara.

Edisi publikasi: 1 Juni 2020

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KEcil, DAN BERUSAHA REPUBLIK INDONESIA | UKM INDONESIA | Badan Usaha Milik Negara

STANDAR WAJIB UNTUK EKSPOR PRODUK MAKANAN

Produk makanan berkaitan erat dengan kesehatan penduduk yang mengkonsumsinya. Jadi, banyak negara tujuan meregulasikan standarnya secara ketat.



Berikut ini komponen-komponen standar yang umumnya diwajibkan oleh berbagai negara tujuan ekspor untuk produk makanan.

JENIS STANDAR WAJIB	DESKRIPSI SINGKAT
RESIDU PESTISIDA	Batas maksimal residu yang boleh ada pada produk makanan. Contoh: Aldicarb, Endosulfan, Imidacloprid
KONTAMINAN	Batas maksimal kontaminan tertentu (barang yang tidak dikehendaki yang dapat tercampur) yang diperbolehkan pada produk makanan. Contoh: Zinc, Copper, Mercury, Tin
KONTAMINASI MIKROBIOLOGI	Kriteria mikrobiologi tidak diperbolehkan pada produk makanan. Contoh: E-Coli, Salmonella, Yeast
ADITIF, ENZIM, DAN PERASA	Daftar aditif, enzim, dan perasa yangizinkan penggunaannya dalam bahan makanan. Contoh: monosodium glutamate (MSG)
PENGEMASAN	Bahan baku yang diperbolehkan bersentuhan dengan makanan, khususnya pada kemasan makanan individu atau jumlah besar (bulk).
PELABELAN	Persyaratan informasi pelabelan pada produk makanan. Disini juga diuraikan tentang pelabelan detail gizi dan bahan baku yang dapat menyebabkan alergi bagi konsumen.

*Sahabat UKM Makanan mau tahu selengkapnya? Baca yuk artikelnya di bit.ly/ukmindonesia04

Standar Khusus

Edisi publikasi 1 Juni 2020

KEMENTERIAN KOPERASI, UKM DAN PERUSAHAAN REPUBLIK INDONESIA

UKM INDONESIA

KEKAMPUSAN BERUSAHA

STANDAR KHUSUS yang membuat UKM Makanan bisa UNGGUL ekspor



UKM yang tidak memenuhi STANDAR WAJIB tidak mungkin bisa ekspor. Sementara yang sudahenuhi STANDAR WAJIB dan STANDAR UMUM, hampir pasti bisa ekspor - namun mungkin mudah tergantikan jika yang bisaenuhi standar umum semakin banyak. Mau terus unggul dan bisa langgeng ekspor terus? Temukan segmen pasar makanan yang SPESIFIK dan kenali STANDAR KHUSUSnya, itulah kuncinya.

Standar khusus tidak dibutuhkan oleh banyak pembeli/importir, sehingga ini bersifat lebih tidak wajib untuk dipersiapkan. Untuk ilustrasi lebih jelasnya, mari kita lihat perbedaan tersebut pada kasus produk kopi. Standar umum yang dibutuhkan banyak pembeli/importir adalah adanya sertifikat GLOBAL G.A.P untuk kualitas proses pertanian kopi, serta sertifikat ISO 9001 atau ISO 22000 untuk kualitas proses pengolahan kopi. Di lain hal, terdapat sebagian pembeli/importir yang khusus mendistribusikan produk organik, juga membutuhkan sertifikasi organik untuk memastikan bahwa kopi diproduksi dengan metode organik.

Kesimpulannya, **standar khusus tidak berlaku untuk semua pembeli/importir**. Sehingga, eksportir haruslah mengetahui siapa target pembeli/importir, sebelum menyiapkan standar khusus ini. Yang harus diutamakan dalam mempersiapkan ekspor adalah standar umum yang dibutuhkan oleh kebanyakan pembeli/importir. Akan tetapi, yang jelas **standar khusus ini akan memberikan keunggulan bagi eksportir karena target pasarnya spesifik**.

2

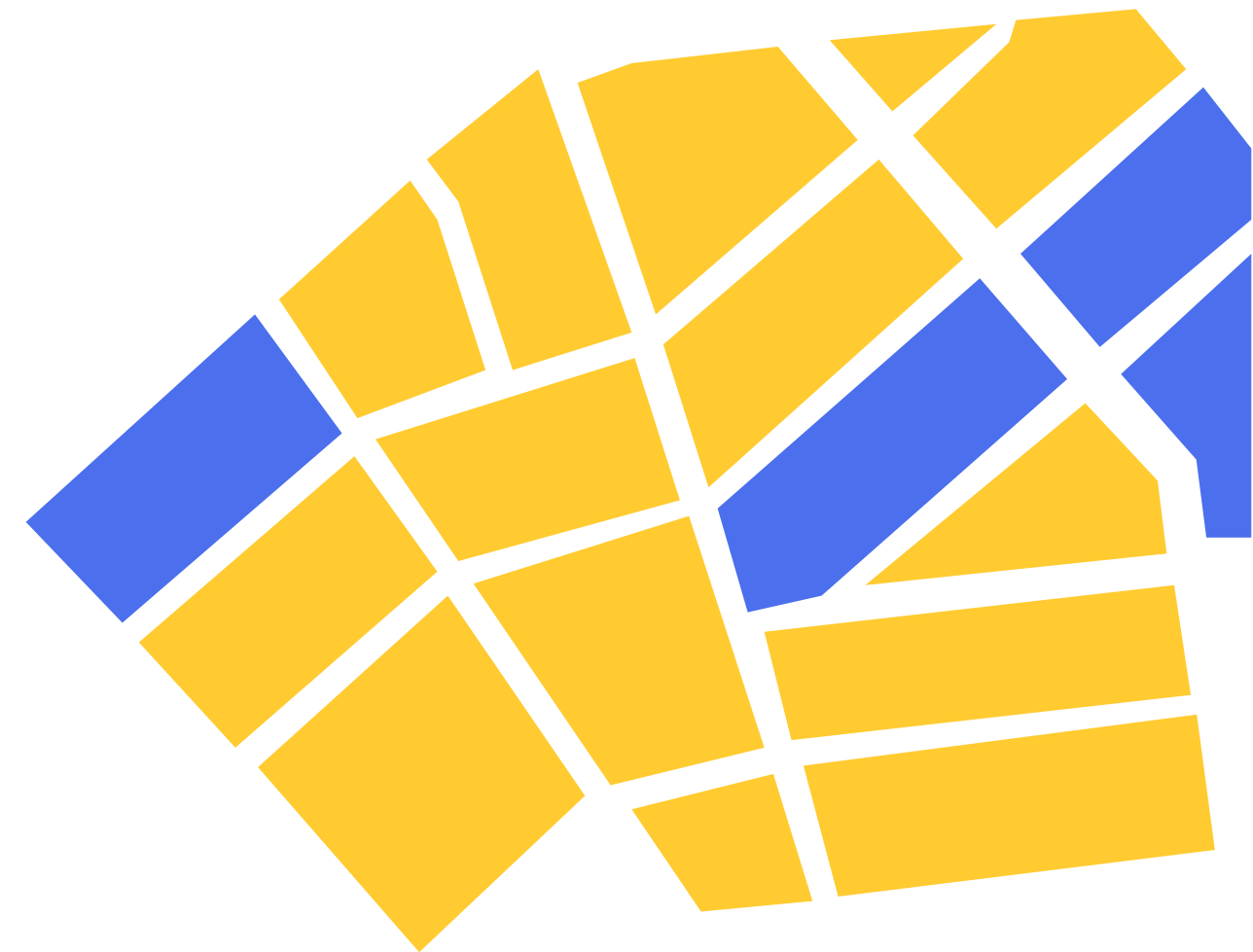
Global Value Chain (GVC)


Saat ini Indonesia rasanya perlu lebih fokus dalam upaya peningkatan nilai ekspor. Bukan hanya ekspor barang mentah tentunya, tetapi ekspor barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai tambah. Selama ini sebagian besar ekspor yang dilakukan Indonesia masih berbasis komoditas mentah atau bahan baku. Imbasnya, **pendapatan ekspor Indonesia sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas dunia.** Saat perekonomian dunia melambat dan berdampak pada penurunan produksi serta harga komoditas dunia maka permintaan ekspor Indonesia pun ikut menurun.

Langkah yang bisa diambil pemerintah untuk menghadapi tantangan ini adalah **meningkatkan partisipasi Indonesia dalam Global Value Chain (GVC).** Dalam dua dekade terakhir, konsep GVC menjadi sangat populer. Menurut World Bank, **GVC adalah suatu proses untuk menghasilkan satu produk barang jadi yang melibatkan beberapa negara mulai dari proses produksi hingga proses pemasarannya.**

GVC dapat berperan dalam mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan standar hidup suatu negara.

Keunggulan GVC dalam meningkatkan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi membuat GVC direkomendasikan oleh World Bank dan World Trade Organisation (WTO) kepada negara-negara berkembang. Beberapa negara di Asia juga ikut berpartisipasi dalam GVC, tidak terkecuali Indonesia. Sayangnya, jika dibandingkan Negara lain di Asia Tenggara, **angka indeks partisipasi Indonesia masih terbilang rendah.**





WTO mencatat pada tahun 2017 Indeks Partisipasi Indonesia adalah 43,5, berada di bawah Malaysia (60,8) dan Thailand (54,3).

Bahkan dalam Laporan Global Value Chain Development Report 2019 yang dirilis oleh WTO dikemukakan bahwa **Indeks Partisipasi Indonesia baik forward maupun backward mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007.** Pemerintah sebagai pemangku kebijakan tentu perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan indeks partisipasi Indonesia jika ingin meningkatkan nilai ekspor melalui GVC.

Menurut rekomendasi World Bank untuk dapat mengoptimalkan partisipasi dalam GVC, negara berkembang haruslah memiliki strategi dan kebijakan yang jelas dengan didukung oleh koordinasi antar-elemen baik pemerintah maupun swasta. Hal ini berarti **kebijakan terkait pembatasan ekspor-impor dan investasi harus diatur sedemikian rupa agar mendukung pelaksanaan GVC.** Dimensi lain yang juga perlu diperhatikan adalah **penyiapan sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pembangunan infrastruktur serta mobilitas pasar tenaga kerja. meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam GVC.**

UMKM sebagai pelaku ekonomi di Indonesia dapat meningkatkan kualitas produk dan kapasitas usaha jika diikutsertakan dalam GVC. Saat bergabung dalam GVC, akses UMKM terhadap informasi dan teknologi akan lebih terbuka. UMKM dituntut untuk memiliki standar proses produksi dan output yang tinggi sehingga kualitas UMKM Indonesia akan semakin baik.

Keikutsertakan UMKM Indonesia dalam GVC juga membuka peluang untuk mendapatkan aliran dana investasi serta adopsi teknologi dari luar negeri. Pada akhirnya, daya saing UMKM Indonesia akan semakin meningkat dan mampu bersaing di pasar internasional sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

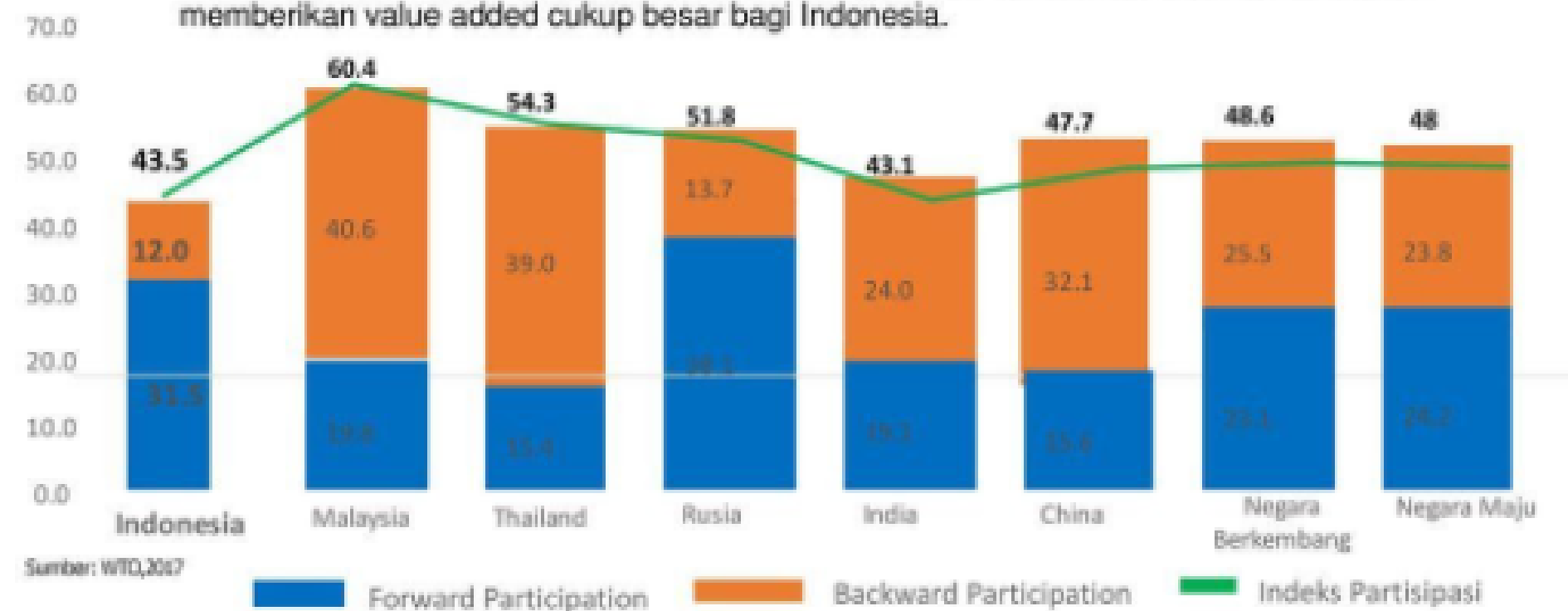
Posisi Indonesia dalam *Global Value Chain*



Partisipasi Indonesia dalam GVC masih tergolong rendah dibandingkan ekonomi negara berkembang maupun yang sudah maju, yakni hanya sekitar 43.5%. Partisipasi Indonesia didominasi oleh *forward participation* sebesar 31.5% dan *Backward Participation* sebesar 12% (*Backward Participation* / nilai tambah ekspor Indonesia tersebut relatif kecil dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand)

Rendahnya tingkat partisipasi Indonesia dalam GVC disebabkan karena:

- Indonesia masih memproduksi pada intermediate goods yang nantinya akan kembali dibeli setelah menjadi barang jadi.
- Indonesia masih bergantung pada ekspor hasil agrikultur dan tambang yang mana tidak memberikan value added cukup besar bagi Indonesia.



**Terima
Kasih**

